

**PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Ana Muchlisa Rezeqiah
NIM : 22 2013 159**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ana Muchlisa Rezeqiah

NIM : 22 2013 159

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis



(Ana Muchlisa Rezeqiah)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi
Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan)
Nama : Ana Muchlisa Rezeqiah
NIM : 22 2013 159
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal... 15 Maret 2017

Pembimbing,



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA.
NIDN/NBM: 0216106902/944806

Mengetahui,

Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA.
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan patah semangat (HR, Muslim no. 2664)"

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (Qs Al-Baqarah : 286)"

"It always seems impossible until it's done"

(Ana Muchlisa Rezeqiah)

Terucap syukur pada MU Allah

SWT

Kupersembahkan untuk:

- *Orangtuaku Tercinta*
- *Dosen Pembimbingku*
- *Sahabat-sahabat terbaikku*
- *Almamaterku.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikumn Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)” sebagai persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada orang tua tercinta yaitu Ayahanda Tajudin dan Ibunda Fathiah Kurniaty yang telah mendidik, mendoakan, membiayai, menemani dan memberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Betri Sirajuddin, SE, M.Si.,Ak.,CA sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat, dan saran-saran dengan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Abid Djazuli, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Fauzi Ridwan, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE, M.Si.,Ak.,CA selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang dan sebagai Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan serta memberi saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pempinan dan staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Palembang,

Penulis

Ana Muchlisa Rezeqiah

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Landasan Teori.....	13
1. Teori Keagenan.....	13
2. Anggaran.....	14

3. Anggaran Berbasis Kinerja.....	14
4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	20
C. Hipotesis.....	25
BAB III. METODELOGI PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Operasional Variabel.....	27
D. Populasi dan sampel.....	27
E. Data Yang Diperlukan.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	32
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	33
1. Analisis Data	33
2. Teknik Analisis	35
a. Uji Validitas	35
b. Uji Reliabilitas	36
c. Uji Asumsi Klasik	37
d. Regresi Linear Sederhana	39
e. Koefisien Determinasi	39
f. Uji Hipotesis	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil Penelitian.....	42
1. Gambaran Umum BAPPEDA Sumatera Selatan.....	42
2. Visi Dan Misi.....	42
3. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	44
4. Tugas Dan Tanggung Jawab.....	47
5. Gambaran Karakteristik Responden.....	49
6. Gambaran Karakteristik Variabel.....	52
B. Hasil Pengolahan Data	54
1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	54

a. Anggaran Berbasis Kinerja	54
b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59
2. Hasil Pengujian Data	63
a. Uji Validitas	64
b. Uji Reliabilitas	66
c. Uji Asumsi Klasik	66
d. Regresi Linear Sederhana	69
e. Uji Koefisien Determinasi	70
f. Uji Hipotesis.....	71
C. Pembahasan Hasil Penelitian	71
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran Dan Realisasi Belanja BAPPEDA Sumatera Selatan Tahun 2014 Dan 2015.....	6
Tabel I.2	Target Dan Realisasi Program-Program BAPPEDA Sumatera Selatan	7
Tabel II.1	Persamaan Dan Perbedaan Penelitian	12
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	27
Tabel III.2	Daftar Populasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan	28
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	50
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Berdasarkan Masa Kerja..	51
Tabel IV.4	Data Ordinal Dan Data Interval Variabel.....	53
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Persiapan Anggaran.....	54
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Ratifikasi Anggaran.....	56
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Implementasi Anggaran	57
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pelaporan dan Evaluasi Anggaran	58
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Perencanaan Strategis	59

Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Perencanaan Kinerja	60
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengukuran Kinerja	61
Tabel IV.12	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pelaporan Kinerja.....	62
Tabel IV.13	Hasil Uji Validitas Variabel Anggaran Berbasis Kinerja	64
Tabel IV.14	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65
Tabel IV.15	Hasil Uji Reliabilitas	66
Tabel IV.16	Hasil Pengujian Autokorelasi	69
Tabel IV.17	Hasil Regresi Linear Sederhana	69
Tabel IV.18	Hasil Uji Koefisien Determinasi	70
Tabel IV.19	Hasil Uji Hipotesis	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktu Organisasi.....	49
Gambar Iv.2	Hasil Uji Normalitas Data	67
Gambar Iv.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner
- Lampiran 2 : Hasil Pengujian Menggunakan SPSS
- Lampiran 3 : Data Ordinal dan Interval
- Lampiran 4 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 5 : Jadwal Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)
- Lampiran 8 : Sertifikat TOEFL
- Lampiran 9 : Sertifikat KKN
- Lampiran 10 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Ana Muchlisa Rezeqiah/222013159/2017 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan *software* SPSS versi 24. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil yang diambil 53 sampel dengan teknik sampel random sederhana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci : anggaran berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja

ABSTRACT

Ana Muchlisa/222013159/2017/Effect of Budgeting Performance Based Toward Government Performance Accountability (A Case Study in Regional Development Planning Board of South Sumatera Province).

Problem of this research was how the influence of budgeting performance based toward performance accountability of governmental institution in Regional Development Planning Board of South Sumatera Province. The purpose of this study was to determine the influence of budgeting performance based toward performance accountability of governmental institution in Regional Development Planning Board of South Sumatera Province. The type of research was associative. The data used in this study were primary and secondary data obtained from questionnaires, documentation, and interviews. Data were analyzed using simple linear regression with SPSS version 24. The population in this study was all employees of the civil servants and 53 were selected as samples by using simple random sampling technique.

The results of this study indicated that the budgeting performance based significantly affected on performance accountability of governmental institution.

Keywords: budgeting performance based, performance accountability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan yang komperhensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

Dalam pengalokasian sumber dana agar menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan adanya penganggaran. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter.

Anggaran dapat terealisasi dengan baik apabila dalam penganggaran tersebut ada dukungan aktif dan pelaksana tingkat atas maupun tingkat bawah, hal ini menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatannya. Anggaran merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian, sedangkan penganggaran (*budgeting*) menunjukkan suatu proses penyusunan anggaran, yaitu sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi

dari rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan rencana tersebut.

Mardiasmo (2009: 61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas dasar pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Siklus anggaran pada sektor publik yang pertama adalah tahap persiapan anggaran. Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Kedua adalah tahap ratifikasi, pada tahap ini integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif. Ketiga, tahap implementasi/pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Terakhir, tahap pelaporan dan evaluasi. Pada tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting & evaluation* tidak akan menemukan banyak masalah.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui pelaporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, pelaksanaan penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam sistem AKIP ini berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil pencapaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Keluaran utama dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini sangat penting digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintahan. Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi yang relevan bagi para pengguna laporan tersebut yaitu pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan dan unsur perencanaan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu organisasi atau perangkat daerah yang membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentulah mempedomani capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten atau Kota, Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Bahri (2012) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu sebesar 64,1 tetapi ada faktor lain yaitu sebesar 35,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Haspiarti (2012) meneliti Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan perencanaan anggaran dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah namun pelaksanaan anggaran serta evaluasi kinerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut penelitian Harjanti (2009) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja mempunyai pengaruh yang sangat lemah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berikut target dan realisasi anggaran belanja yang dihasilkan oleh

BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 dan 2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi	
			Target (%)	Capaian (%)
2014	28.316.396.000	25.977.359.143	100	91,74
2015	26.722.349.000	25.550.000.526	100	95,44

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2014 dan 2015 masih belum tercapai sesuai target meskipun pada tahun 2015 realisasi anggaran naik sebesar 3,7% dari tahun 2014. Ini menunjukkan dalam penyusunan anggaran belanja daerah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum tercapai. Hal ini dapat dilihat dari laporan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel I.2
Target dan Realisasi Program-Program
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 dan 2015

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	2014			2015		
		Target Capaian Program (%)	Realisasi Kinerja Program (%)	Tingkat Realisasi (%)	Target Capaian Program (%)	Realisasi Kinerja Program (%)	Tingkat Realisasi (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	94,77	94,77	100	95,78	95,78
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	100	91,32	91,32	100	90,29	90,29
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100	98,38	98,38	100	90,43	90,43
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	88,04	88,04	100	93,49	93,49
5	Program Pengembangan Data/Informasi	100	99,61	99,61	100	95,57	95,57
6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	100	97,43	97,43	100	98,49	98,49
7	Program Kerjasama Pembangunan	100	87,43	87,43	100	95,20	95,20
8	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	96,61	96,61	100	97,52	97,52
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	85,87	85,87	100	97,45	97,45
10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100	72,93	72,93	100	92,83	92,83
11	Program Perencanaan Sosial Budaya	100	89,85	89,85	100	98,31	98,31
12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	100	39,65	39,65	100	83,48	83,48
13	Program Perencanaan Tata Ruang	100	93,03	93,03	100	99,61	99,61
14	Program Pemanfaatan Tata Ruang	-	-	-	100	97,08	97,08
Total		1300	1134,92	87,30	1400	1325,53	94,68

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi program pada tahun 2015 pun meningkat sebesar 7,38%. Meskipun demikian, ada 3 program yang

mengalami penurunan pada tahun 2015 di antaranya adalah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang turun sebesar 1,03%, Program Peningkatan Disiplin Aparatur turun sebesar 7,95% dan Program Pengembangan Data/Informasi turun sebesar 4,04%. Kendati demikian, menurut Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sudah dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk laporan penelitian yang diberi judul Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memahami dengan baik bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2) Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Memberikan informasi serta masukan kepada pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan sebagai pertimbangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

3) Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Komang, dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah yang berkantor di Kota Singaraja. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil Penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Haspiarti (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintahan Kota Parepare). Rumusan masalah dalam penelitian ini ada empat, antara lain bagaimanakah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare, bagaimanakah pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah kota parepare, bagaimanakah pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare dan bagaimanakah pengaruh evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare, untuk menjelaskan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare, untuk menjelaskan pengaruh pelaporan/pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare, dan untuk menjelaskan pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota parepare. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa data dari hasil jawaban responden dalam kuesioner. Hasil Penelitian ini adalah perencanaan anggaran, implementasi/perencanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Syambudi Prasetya Bahri (2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon). Tujuan penelitian ini ada tiga, yang pertama adalah untuk mengetahui penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah, yang kedua untuk mengetahui akuntabilitas publik pada instansi pemerintah, dan terakhir adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik

instansi pemerintah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas publik instansi pemerintah.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul, Nama, Tahun Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KHP Bali Tengah Kota Singaraja Komang, dkk (2014)	Analisis data yang digunakan sama, yaitu analisis kuantitatif.	Penelitian sebelumnya menggunakan teknik <i>purposive sample</i> sedangkan penelitian ini menggunakan <i>simple random sampling</i> .
2	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintahan Kota Parepare) Haspiarti (2012)	Data yang digunakan sama, yaitu menggunakan data primer.	Terletak pada indikator variabel dan teknik pengambilan sampel.
3	Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon) Syambudi Prasetya Bahri (2012)	Jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian asosiatif.	Terletak pada variabel dan indikator penelitian

Sumber: Penulis, 2017

B. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Budi (2015: 5-6) *Agency* adalah keterkaitan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*.

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan

apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2009: 61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Abdul (2007: 164) anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu setahun. Sedangkan menurut Deddi (2006: 48) anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.

Berdasarkan teori-teori di atas, anggaran adalah suatu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk untuk pengendalian keuangan, perencanaan manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggungjawaban kepada publik.

3. Anggaran Berbasis Kinerja

a. Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Indra (2010: 202) mengemukakan anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi

yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi.

Mardiasmo (2009: 84) Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi.

b. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009: 63) mengemukakan pentingnya anggaran berbasis kinerja bagi pemerintahan karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengerahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah

keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choise*), dan *trade offs*.

- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

c. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2009: 70-73) siklus anggaran meliputi empat tahap, antara lain:

1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2) Tahap Ratifikasi (*Approval/Ratification*)

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki "*managerial skill*", "*salesmanship*", dan "*coalition building*" yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari

eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahap Implementasi (*Implementation*)

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode anggaran berikutnya.

4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi (*Reporting & Evaluation*)

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak akan menemui banyak masalah.

d. Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja

Deddi (2006: 59) dijelaskan bahwa kelebihan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran disusun berdasarkan aktivitas yang didukung oleh estimasi biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif.
- 2) Penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur *output* dan *input*.
- 3) Anggaran kinerja mensyaratkan adanya data-data kinerja memungkinkan legislatif untuk menambah atau mengurangi dari jumlah yang diminta dalam fungsi dan aktivitas tertentu.
- 4) Menyediakan pada eksekutif pengendalian yang lebih terhadap bawahannya.
- 5) Anggaran kinerja menekankan aktivitas yang memai anggaran daripada beberapa jumlah anggaran yang terpakai.

e. Prinsip – Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Abdul (2007: 178) Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja antara lain:

1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

2) Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya.

3) Keadilan Anggaran

Pemerintah pusat atau daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil tanpa diskriminasi agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal.

5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan.

4. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2009: 21) Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Menurut Turner dan Humle yang dikutip oleh Mardiasmo (2009: 21) Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Berdasarkan teori-teori di atas, jadi akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

b. Macam-macam Akuntabilitas

Mardiasmo (2009: 21) akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan daerah, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Definisi Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan Perpres nomor 29 tahun 2014. Menurut Perpres nomor 29 tahun 2014 akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Menurut Indra (2010: 88) akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja adalah capaian kinerja tujuan dan

sasaran kinerja dengan pengungkapan dan hasil pengukuran kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja tahun saat ini dan tahun sebelumnya.

Kesimpulan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

d. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan AKIP harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan.
- 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat.

6) Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, agar pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lebih efektif, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Menurut Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003, Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, antara lain:

1) Rencana Strategik

Rencana Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan

(lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang setidaknya memuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kerja tahunan.

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana strategik.

4) Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

C. Hipotesis

Indra (2010: 202) anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi. Menurut Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 dalam sistem AKIP berkaitan dengan pengukuran kinerja yang memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil capaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah.

Komang, dkk (2014) jika suatu organisasi menerapkan anggaran berbasis kinerja yang kurang memadai, maka akan menimbulkan hambatan dan akhirnya informasi akuntansi kualitasnya memburuk yang akan mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan. Dengan kurang memadainya penerapan anggaran berbasis kinerja, hal tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kurang baik.

H₁: Terdapat pengaruh yang signifikan pada anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2) Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3) Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Jl. Kapten A. Rivai No. 23, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Telepon (0711) 30129, 356118, 356018.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.	1) Persiapan Anggaran 2) Ratifikasi Anggaran 3) Implementasi Anggaran 4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.	1) Rencana Strategis 2) Perencanaan Kinerja 3) Pengukuran Kinerja 4) Pelaporan Kinerja

Sumber: Penulis, 2017

D. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2014: 115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai badan perencanaan pembangunan provinsi sumatera selatan yang berjumlah 111 (seratus sebelas) orang yang terdiri dari:

Tabel III.2
Daftar Populasi Badan Perencanaan Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bappeda	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	1 orang
4	Subbagian Keuangan	1 orang
5	Subbagian Umum dan Kepegawaian	1 orang
6	Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	1 orang
7	Subbidang Sumber Daya Alam, IPTEK	1 orang
8	Subbidang Pariwisata, Industri, dan Perdagangan	1 orang
9	Subbidang Pendanaan Pembangunan	1 orang
10	Bidang Pemerintahan, Kessos, dan Kesra	1 orang
11	Subbidang Pemerintahan	1 orang
12	Subbidang Kesejahteraan Sosial	1 orang
13	Subbidang Kesejahteraan Rakyat	1 orang
14	Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 orang
15	Subbidang Infrastruktur	1 orang
16	Subbidang Pengembangan Wilayah dan Pemukiman	1 orang
17	Subbidang Prasarana Wilayah dan Pemukiman	1 orang
18	Bidang Pengendalian, Evaluasi, & Perencanaan Strategis	1 orang
19	Subbidang Evaluasi	1 orang
20	Subbidang Pengendalian dan Pelaporan	1 orang
21	Subbidang Strategis Perencanaan	1 orang
22	Staf Bappeda	90 orang
	Total	111 orang

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017

Sugiyono (2014: 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Probability Sampling*

Probability sampling merupakan metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

a. Random Sederhana (*Simple Random Sampling*)

Sampel random sederhana (*simple random sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel.

b. Strata Sampel (*Stratified Sampling*)

Strata sampel (*stratified sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri.

c. *Cluster Sampling*

Cluster sampling merupakan populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau cluster lalu kemudian beberapa cluster tidak perlu homogen.

d. Sampel Ganda (*Double Sampling*)

Sampel ganda (*double sampling*) sering disebut dengan istilah sampel berjenjang (*sequential sampling*) sampel multistap (*multiphase sampling*).

2. *Non Probability Sampling*

Non probability sampling merupakan setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random sederhana (*simple random sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Menurut Wiratna (2014: 82) Untuk menentukan jumlah sampel digunakan perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.

Berdasarkan data dari Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, jumlah pegawai negeri sipil tahun 2016 tercatat sebanyak 111

(seratus sebelas) orang. Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persentase kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{111}{1 + 111(0,1)^2}$$

$n = 52,60$ pembulatan 53

Jadi, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 53 pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri atas 1 kepala Bappeda, 1 Sekretaris, 4 kepala bidang, 15 kepala sub bagian, dan 32 staf Bappeda.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Anwar Sanusi (2016: 104) adapun sumber data cenderung pada pengertian dari mana (sumbernya) data itu berasal. Berdasarkan hal itu, data tergolong menjadi dua bagian:

1.) Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti seperti, hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

2.) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui

kuesioner padan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi yang berupa data realisasi anggaran belanja dan laporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner atau angket yang berhubungan dengan indikator-indikator yang digunakan dengan unit kerja terkait dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan data realisasi anggaran belanja dan laporan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2014: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat hasil

kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tabelaris) yang berupa penelitian dari hasil kuesioner.

Menurut Sugiyono (2014: 132-136) berbagai skala yang digunakan untuk penelitian yaitu:

- a. Skala *Likert*
- b. Skala *gutman*
- c. *Rating scale*
- d. *Semantic deferential*

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada skala *likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala *likert* dapat berupa kata-kata antara lain:

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4
Ragu-ragu	= RR	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan hipotesis (uji t) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *statistical program science* (SPSS) versi 24. Sebelumnya melakukan analisis sesuai dengan syarat metode OLS (*ordinary least square*) maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas dan uji realibilitas.

a. Uji Validitas

Sugiyono (2010: 352) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dengan

menggunakan alat bantu program statistik dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut valid.
- 2) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- 3) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom Corrected Item Total Corelation.

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2010: 354) uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan software SPSS versi 24. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Dasar dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) *Cronbach's Alpha* > 0,6_ *Cronbach's Alpha acceptable* (*Construct reable*).
- 2) *Cronbach's Alpha* ≤ 0,6_ *Cronbach's Alpha poor acceptable* (*construct reable*).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogorov-smirnov Test*). Dalam melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *Normal P-P plot*. Santoso (2012: 234) Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *varians* dari residual suatu pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk *varians* yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Dalam melakukan uji heteroskedastisitas untuk penelitian, peneliti menggunakan uji *scatter plot*. Dasar Pengambilan Keputusan untuk uji heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot*, yaitu:

- a) Jika suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Darbin Watson (DW)* dengan ketentuan DW jika berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi..

d. Regresi Linear Sederhana

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk melihat secara langsung pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sugiyono (2014: 269) mengatakan regresi sederhana di dasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Iqbal (2012: 219) persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a = Harga Y bila x = 0 (harga konstan)

b = Koefisien Regresi Anggaran Berbasis Kinerja

x = Anggaran Berbasis Kinerja

e. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total varian dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R square*. Namun apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R square*. Hasil perhitungan *Adjusted R Square* dapat dilihat pada output mode summary.

Pada kolom *Adjusted R Square* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

f. Uji Hipotesis

Sugiyono (2014: 93) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka perlu dilakukan pengujian atas hipotesis tersebut dengan uji t:

1) Merumuskan Hipotesis

H_0 : anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H_a : anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2) Menentukan Taraf Nyata

Sebelum pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikan atau taraf nyata. Hal itu dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara H_0 dan H_a . Taraf nyata yang dipilih adalah 5% dari t.

3) Kesimpulan

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika H_0 ditolak maka H_a diterima.

b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jika H_a ditolak maka H_0 diterima.

Selanjutnya untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dari koefisien korelasi maka gunakan koefisien determinasi dengan persentase (%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu organisasi atau perangkat daerah adalah untuk membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Bappeda dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014-2018 yaitu “Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional”. Berdasarkan pada visi Provinsi Sumatera Selatan tersebut, visi Bappeda ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Lembaga Perencanaan yang Andal dan Akuntabel Berbasis Kebutuhan Masyarakat Menuju Sumsel Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional.”

Pengertian visi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang andal mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efisien, dan efektif.
2. Perencanaan yang akuntabel berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan terukur dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
3. Berbasis Kebutuhan Masyarakat yang berarti dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dengan mengedepankan proses *bottom-up* untuk menampung aspirasi masyarakat melalui proses Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten atau Kota, sampai dengan Musrenbang Provinsi.
4. Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional berarti kondisi kehidupan masyarakat pada semua lapisan yang mampu memenuhi hak dasarnya lebih dari hanya memenuhi kebutuhan

dasar, sekaligus merasakan suasana yang aman dan nyaman dalam berkehidupan dan berusaha, daerah yang semakin maju dan berkembang dalam berbagai dimensi pembangunan meliputi sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial, serta kapasitas dan kapabilitas daerah yang berperan serta secara aktif dalam pergaulan, kerjasama, dan hubungan internasional.

b. Misi

Misi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat
2. Mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Sumatera Selatan berjalan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, sehingga memberikan kontribusi kepada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
3. pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten atau kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
4. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
5. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten atau Kota;
6. pengkoordinasian perencanaan kerja sama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
7. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis provinsi;
8. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
9. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
10. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
11. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;

12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
 3. Subbidang Pendanaan Pembangunan.
- d. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Subbidang Pemerintahan;
 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
- e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 1. Subbidang Infrastruktur;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.
- f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :

1. Subbidang Evaluasi
2. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
3. Subbidang Perencanaan Strategis.

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas dan Tanggungjawab

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi, keuangan dan sumber daya di lingkungan Bappeda.

c. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP serta menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan Provinsi.

d. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan Provinsi.

e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

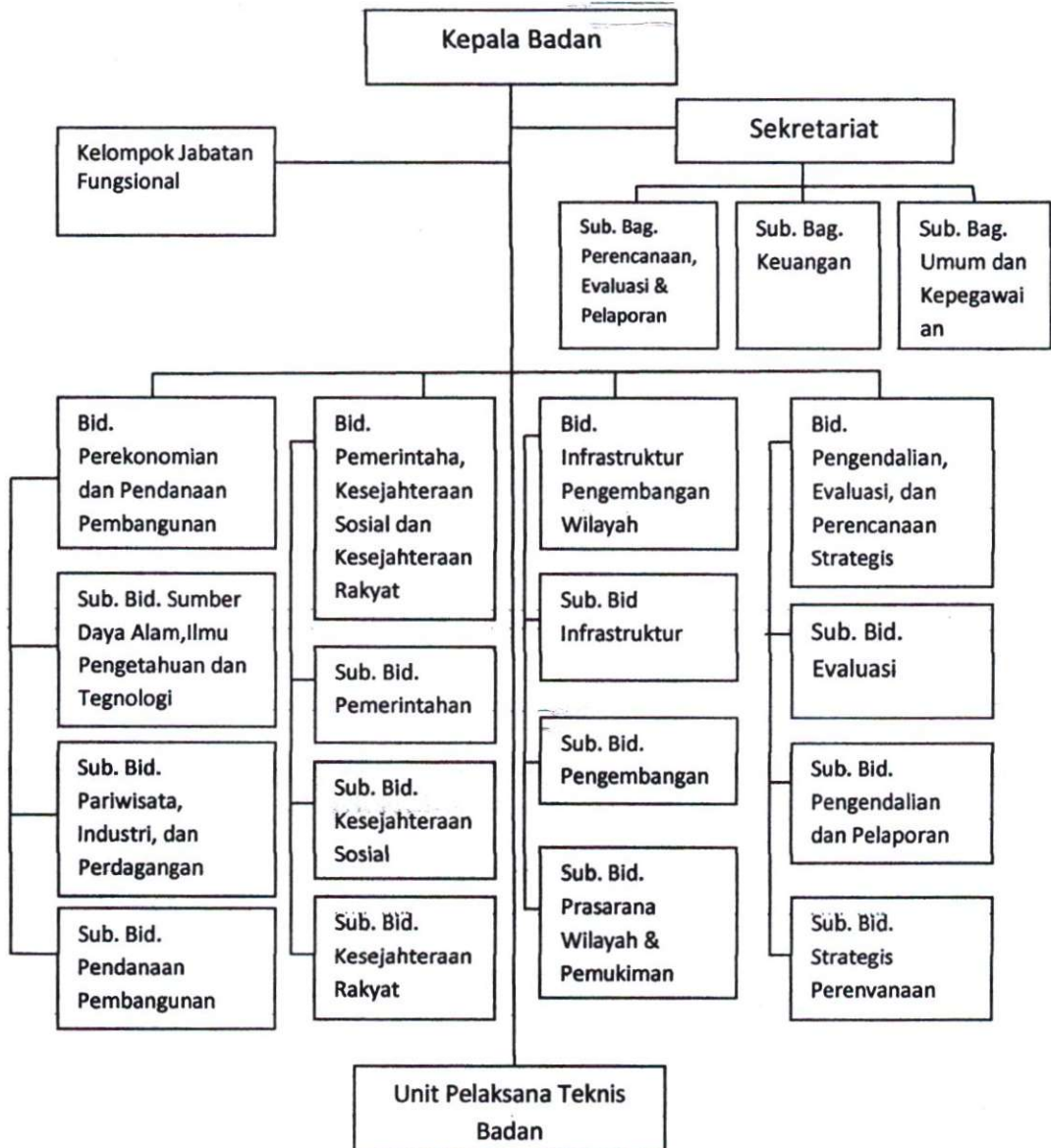
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

f. Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, RKT, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan,

penyusunan, penganalisaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi



Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017

5. Gambaran Karakteristik Responden

Penelitian ini berdasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami.

Kuesioner ini telah disebarakan kepada pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah kuesioner yang disebarakan adalah 53 kuesioner yang dimulai dari tanggal 11 Januari sampai dengan 20 Januari 2017, karena waktu yang cukup cepat sehingga jumlah kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 kuesioner. Jadi, jumlah kuesioner yang menjadi sumber data untuk diolah dan dianalisis adalah sebanyak 48 kuesioner.

a. Gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel IV.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	Laki-Laki	26	54,2
2.	Perempuan	22	45,8
Jumlah		48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa dari 48 responden dalam penelitian ini terdapat responden laki-laki sebanyak 26 orang atau 54,2% dan responden perempuan sebanyak 22 orang atau 45,8%.

b. Gambaran karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Keterangan	Jumlah	%
3.	S1 (Sarjana)	29	60,4
4.	S2 (Master)	19	39,6
5.	S3 (Doktor)	0	0
Jumlah		48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa responden berpendidikan terakhir lulusan S1 atau Sarjana adalah sebanyak 29 orang atau 60,4% dan lulusan S2 atau Master sebanyak 19 orang atau 39,6%. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat mempengaruhi profesionalisme dan kualitas kerja sehingga pegawai dapat menjalankan tugas kepegawaian secara profesional.

c. Gambaran karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Keterangan	Jumlah	%
1.	1-5 tahun	15	31,3
2.	6-10 tahun	11	22,9
3.	11-15 tahun	12	25,0
4.	16-20 tahun	3	6,3
5.	≥ 21 tahun	7	14,6
Jumlah		48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan sebanyak 15 responden atau 31,3 yang bekerja selama 1-5 tahun, 11 responden atau 22,9% bekerja selama 6-10 tahun, 12 responden atau 25% bekerja selama 11-15 tahun, 3 responden atau 6,3% bekerja selama 16-20 tahun, dan 7 responden atau 14,6% bekerja selama ≥ 21 tahun. Masa kerja yang relatif lama memunculkan tingkat kematangan berfikir dan kematangan dalam proses peningkatan kualitas pekerjaan atau kinerja.

6. Gambaran Karakteristik Variabel

Karakteristik yang diberikan kepada responden terdiri dari 2 variabel, yaitu 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel terikat adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Butir pernyataan pada variabel bebas berjumlah 17 pernyataan yang terdiri dari 4 indikator yaitu, persiapan anggaran, ratifikasi anggaran, implementasi anggaran, dan pelaporan dan evaluasi anggaran. Butir pernyataan pada variabel terikat berjumlah 10 pernyataan yang terdiri dari 4 indikator yaitu, perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Tujuan diberikan pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Data yang sudah diberikan skor kemudian disusun ke dalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis untuk penelitian ini, kemudian skor atas jawaban dari responden dijumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Adapun rekapitulasi data mengenai anggaran berbasis kinerja (X) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
 Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No.	Data Ordinal		Data Interval	
	Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Anggaran Berbasis Kinerja (X)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
1.	80	45	68,430	38,328
2.	80	50	68,420	46,136
3.	72	47	56,223	41,390
4.	76	47	62,047	41,371
5.	76	45	62,383	38,330
6.	75	40	60,531	30,760
7.	63	39	43,441	29,347
8.	77	42	63,838	33,852
9.	78	48	65,853	42,932
10.	72	45	55,853	38,386
11.	71	49	54,629	44,561
12.	71	40	54,473	30,760
13.	73	40	57,451	30,760
14.	81	50	70,156	46,136
15.	78	46	65,177	39,874
16.	76	42	62,369	33,878
17.	68	40	50,267	30,760
18.	71	40	54,985	30,760
19.	68	40	50,267	30,760
20.	71	41	54,581	32,227
21.	68	40	50,267	30,760
22.	69	46	51,699	39,794
23.	74	41	58,916	32,227
24.	72	45	56,267	38,439
25.	77	50	64,112	46,136
26.	72	45	56,000	38,220
27.	68	40	50,267	30,760
28.	68	38	50,267	27,964
29.	68	40	50,267	30,760
30.	61	39	44,346	29,353
31.	34	18	17,657	10,000
32.	63	36	44,357	25,057
33.	50	34	31,770	24,771
34.	71	45	54,583	38,404
35.	70	40	53,189	30,760
36.	65	44	46,619	36,864

37	67	40	49,101	30,760
38	71	44	56,930	36,753
39	78	40	65,056	30,760
40	68	42	50,234	33,855
41	71	40	55,489	30,760
42	76	43	62,065	35,396
43	71	39	55,614	29,691
44	74	46	59,116	39,931
45	78	41	65,050	32,327
46	74	42	59,565	33,931
47	77	40	63,806	30,760
48	74	38	59,410	28,317

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

B. Hasil Pengolahan Data

1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

a. Anggaran Berbasis Kinerja

1) Persiapan Anggaran

Tabel IV.5
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Keterangan	P1		P2		P3		P4		P5	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	23	47,9	19	39,6	28	58,3	17	35,4	17	35,4
Setuju	22	45,8	26	54,2	18	37,5	27	56,3	26	54,2
Ragu-Ragu	1	2,1	1	2,1	1	2,1	3	6,3	2	4,2
Tidak Setuju	2	4,2	2	4,2	1	2,1	1	2,1	2	4,2
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,1
Jumlah	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.5, dengan indikator persiapan anggaran, untuk pernyataan pertama, sebanyak 47% responden menyatakan sangat setuju dan 45,8% setuju bahwa anggaran disusun berdasarkan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan agar tidak terjadi pemborosan dalam penyusunan. Pernyataan kedua, sebanyak 39,6%

responden menyatakan sangat setuju dan 54,2% responden setuju bahwa anggaran disusun berdasarkan tujuan organisasi, alasannya agar sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya. Pernyataan ketiga, sebanyak 58,3% responden menyatakan sangat setuju dan 37,5% setuju bahwa dalam jangka waktu lebih dari satu tahun BAPPEDA memiliki tujuan yang sudah jelas, selaras dengan visi misi, dan menjadi dasar utama pembuatan target program.

Pernyataan keempat, sebanyak 35,4% responden menyatakan sangat setuju dan 53,6% setuju bahwa informasi finansial tersedia dengan lengkap untuk dapat digunakan sebagai penyusunan anggaran, alasannya karena dengan tersedianya informasi finansial yang lengkap maka dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dalam tahap persiapan. dan untuk pernyataan kelima, sebanyak 35,4% responden menyatakan sangat setuju dan 54,2% setuju bahwa rapat penyusunan rencana kinerja anggaran dilaksanakan sebelum penyusunan anggaran dinas karena pada rapat tersebut akan membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Bappeda sebagai pengguna anggaran.

2) Ratifikasi Anggaran

Tabel IV.6
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	20	41,7	12	25	13	27,1
Setuju	24	50	32	66,7	32	66,7
Ragu-Ragu	2	4,2	2	4,2	2	4,2
Tidak Setuju	2	4,2	2	4,2	1	2,1
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
Jumlah	48	100	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.6, untuk indikator ratifikasi, pada pernyataan pertama, sebanyak 41,7% responden menyatakan sangat setuju dan 50% setuju bahwa pimpinan telah memiliki integritas yang tinggi dalam tahap ratifikasi, alasannya karena agar pimpinan dapat menjawab semua bantahan yang akan diajukan pihak eksekutif pada tahap ratifikasi. Pada pernyataan kedua, sebanyak 25% responden menyatakan sangat setuju dan 66,7% setuju bahwa ketepatan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran dengan batas waktu pengesahan yaitu 31 Desember, dan untuk pernyataan ketiga, sebanyak 27% responden menyatakan sangat setuju dan 66,7% setuju bahwa alasan yang disampaikan dalam pengesahan anggaran telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program yaitu sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan standar kerja yang telah ditetapkan.

3) Implementasi Anggaran

Tabel IV.7
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Keterangan	P1		P2		P3		P4	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	23	47,9	19	39,6	28	58,3	17	35,4
Setuju	22	45,8	26	54,2	18	37,5	27	56,3
Ragu-Ragu	1	2,1	1	2,1	1	2,1	3	6,3
Tidak Setuju	2	4,2	2	4,2	1	2,1	1	2,1
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	48	100	48	100	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Pada tabel IV.7; untuk indikator implementasi anggaran, pada pernyataan pertama sebanyak 47,9% responden menyatakan sangat setuju dan 45,8% setuju bahwa pada tahap pelaksanaan anggaran terdapat sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, dimana sistem tersebut dinamakan sistem informasi keuangan daerah yang merupakan suatu program atau aplikasi dengan total anggaran yang sudah tercatat dalam sistem.

Untuk pernyataan kedua, sebanyak 39,6% responden menyatakan sangat setuju dan 54,2% setuju bahwa pelaksanaan anggaran di Bappeda Provinsi Sumsel telah selaras dengan tujuan serta realistis (dapat dicapai), alasannya karena Bappeda Provinsi Sumsel mengimplementasikan anggarannya sesuai dengan program-program yang telah ditentukan. Pada pernyataan ketiga, sebanyak 58,3% responden menyatakan sangat setuju dan 37,5% setuju bahwa terdapat sistem akuntansi yang memadai untuk pengendalian anggaran agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Untuk

pernyataan keempat, sebanyak 35,4% responden menyatakan sangat setuju dan 56,3% setuju bahwa sistem akuntansi diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran berikutnya, alasannya karena dengan adanya sistem, maka dapat meminimalisir kesalahan dalam pencatatan.

4) Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Keterangan	P1		P2		P3		P4		P5	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	9	18,8	7	14,6	8	16,7	7	14,6	9	18,8
Setuju	36	75	37	77,1	36	35	38	79,2	35	72,9
Ragu-Ragu	2	4,2	3	2,1	6,3	4,2	2	4,2	2	4,2
Tidak Setuju	1	2,1	1	2,1	2	4,2	1	2,1	2	4,2
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.8, untuk indikator pelaporan dan evaluasi, pada pernyataan pertama, sebanyak 18,8% responden menyatakan sangat setuju dan 75% setuju bahwa tahap pelaporan dan evaluasi sangat memperhatikan akuntabilitas suatu anggaran dengan laporan yaitu mengenai penyerapan anggaran dan dilaporkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Untuk pernyataan kedua, sebanyak 14,6% responden menyatakan sangat setuju dan 77,1% setuju bahwa hasil pelaporan dan evaluasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, karena apabila sistem tersebut terlaksana dengan baik maka laporan yang dihasilkan pula akan baik dan sesuai dengan rencana.

Untuk pernyataan ketiga sebanyak 16,7% responden menyatakan sangat setuju dan 75% setuju bahwa sistem anggaran kinerja telah berperan sebagai patokan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran dinas, alasannya agar dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk pernyataan keempat, sebanyak 14,6% responden menyatakan sangat setuju dan 79,2% setuju bahwa dalam hal pelaporan anggaran telah sesuai dengan kerangka acuan setiap kegiatan, dan untuk pernyataan kelima, sebanyak 18,8% responden menyatakan sangat setuju dan 72,9% setuju bahwa laporan realisasi anggaran Bappeda telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, serta mendorong aparatur Bappeda Provinsi Sumsel untuk selalu meningkatkan kinerja. Alasannya karena para aparaturnya akan mendapat *reward* bila melakukan kinerja yang baik dan mendapat hukuman bila kinerjanya buruk.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1) Perencanaan Strategis

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	13	27,1	15	31,1	18	37,5
Setuju	33	68,8	29	60,4	27	56,3
Ragu-Ragu	1	2,1	3	6,3	2	4,2
Tidak Setuju	1	2,1	1	2,1	1	2,1
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
Jumlah	48	100	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.9, untuk indikator perencanaan strategis, pada pernyataan pertama, sebanyak 27,1% responden menjawab sangat setuju dan 68,8% setuju bahwa adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, alasannya untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Untuk pernyataan kedua, sebanyak 31,1% responden menjawab sangat setuju dan 60,4% setuju bahwa kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin, alasannya agar terjadi keselarasan dalam pencapaian tujuan. Untuk pernyataan ketiga, sebanyak 37,5% responden menjawab sangat setuju dan 56,3% setuju bahwa visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategis organisasi karena visi dan misi merupakan patokan dalam capaian tujuan organisasi.

2) Perencanaan Kinerja

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	18	37,5	8	16,7
Setuju	27	56,3	36	75
Ragu-Ragu	2	4,2	2	4,2
Tidak Setuju	1	2,1	1	2,1
Sangat Tidak Setuju	-	-	1	2,1
Jumlah	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.10, untuk indikator perencanaan kinerja, pada pernyataan pertama, sebanyak 37,5% responden menjawab sangat setuju dan 56,3% setuju bahwa indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program karena indikator kinerja merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Untuk pernyataan kedua, sebanyak 16,7% responden menjawab sangat setuju dan 75% setuju bahwa kegiatan atau program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat, alasannya agar program-programnya dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

3) Pengukuran Kinerja

Tabel IV.11
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	11	22,9	9	18,8	15	31,3
Setuju	34	70,8	35	72,9	31	64,6
Ragu-Ragu	2	4,2	2	4,2	1	2,1
Tidak Setuju	1	2,1	1	2,1	1	2,1
Sangat Tidak Setuju	-	-	1	2,1	-	-
Jumlah	48	100	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.11, untuk indikator pengukuran kinerja, pada pernyataan pertama, sebanyak 22,9% responden menjawab sangat setuju dan 70,8% setuju bahwa Bappeda melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan karena

hasilnya akan dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas. Untuk pernyataan kedua, sebanyak 18,8% responden menjawab sangat setuju dan 72,9% setuju bahwa bappeda melakukan pengecekan terhadap jalannya program agar dapat memastikan program-programnya terlaksana dengan baik. Untuk pernyataan ketiga, sebanyak 31,3% responden menjawab sangat setuju dan 64,6% setuju bahwa pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program.

4) Pelaporan Kinerja

Tabel IV.12
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Keterangan	P1		P2	
	Σ	%	Σ	%
Sangat Setuju	14	29,2	15	31,3
Setuju	31	64,6	31	64,6
Ragu-Ragu	2	4,2	1	2,1
Tidak Setuju	1	2,1	1	2,1
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-
Jumlah	48	100	48	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.12, untuk indikator pelaporan kinerja, pada pernyataan pertama, sebanyak 29,2% responden menjawab sangat setuju dan 64,6% responden setuju bahwa bappeda membuat laporan kepada atasan untuk setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan, alasannya karena Bappeda Sumatera Selatan sebagai instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan serta

menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya dalam bentuk laporan yang disebut laporan kinerja. Untuk pernyataan kedua, sebanyak 31,3% responden menjawab sangat setuju dan 64,6% setuju bahwa laporan kinerja digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program atau kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Hasil Pengujian Data

Pengujian data validitas dan reliabilitas sangat mempengaruhi data dari hasil penelitian agar hasil penelitian valid dan dapat dibuktikan maka data yang akan dianalisis dan digunakan untuk menguji hipotesis penelitian harus merupakan data yang valid dan reliabel maka dari itu sebelum dilakukan analisis data hendaknya dikumpulkan data terlebih dahulu setelah itu akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana alat ukur yang digunakan, dalam hal ini adalah kuesioner, sedangkan reliabilitas bertujuan untuk menunjuk sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih, dengan kata lain, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama.

a. Uji Validitas

1) Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item-item variabel anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.13
Uji Validitas Skor Jawaban
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

No.	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	0,652	0,291	Valid
2	0,638	0,291	Valid
3	0,773	0,291	Valid
4	0,540	0,291	Valid
5	0,654	0,291	Valid
6	0,743	0,291	Valid
7	0,648	0,291	Valid
8	0,715	0,291	Valid
9	0,604	0,291	Valid
10	0,613	0,291	Valid
11	0,609	0,291	Valid
12	0,606	0,291	Valid
13	0,685	0,291	Valid
14	0,640	0,291	Valid
15	0,614	0,291	Valid
16	0,552	0,291	Valid
17	0,650	0,291	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan oleh penulis dengan bantuan program SPSS versi 24, maka dapat disimpulkan untuk variabel X (anggaran berbasis kinerja) semuanya valid dengan menggunakan r_{tabel} pada taraf nyata (α) = 5% dan $df (n-2) = (48-2) = 46$, maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,291. Hal itu dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel} (0,291)$ berarti

semua item pernyataan yang ada pada instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

2) Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji validitas untuk item-item variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.14
Uji Validitas Skor Jawaban
Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No.	r hitung	r tabel	Kesimpulan
1	0,753	0,291	Valid
2	0,819	0,291	Valid
3	0,873	0,291	Valid
4	0,799	0,291	Valid
5	0,652	0,291	Valid
6	0,752	0,291	Valid
7	0,724	0,291	Valid
8	0,734	0,291	Valid
9	0,801	0,291	Valid
10	0,730	0,291	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan oleh penulis dengan bantuan program SPSS versi 24, maka dapat disimpulkan untuk variabel Y (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) semuanya valid dengan menggunakan r_{tabel} pada taraf nyata (α) = 5% dan df ($n-2$) = (48-2) = 46, maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,291. Hal itu dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,291) berarti semua item pernyataan yang ada pada

instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang valid dalam analisis selanjutnya.

b. Uji-Reliabilitas

Tabel IV.15
Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X) dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No.	Variabel	<i>Croanbach's Alpha</i>	Nilai <i>Croanbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Anggaran Berbasis Kinerja (X)	0,911	0,60	Reliabel
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,921	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh penulis dengan bantuan SPSS versi 24, maka dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja (X), nilai *Croanbach's Alpha* \geq Nilai *Alpha* ($0,911 \geq 0,60$) maka variabel X reliabel. Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), nilai *Croanbach's Alpha* \geq Nilai *Alpha* ($0,921 \geq 0,60$) maka variabel Y reliabel. Pada taraf nyata (α) = 5%, berarti semua pernyataan yang ada pada instrumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur yang reliabel dalam analisis selanjutnya.

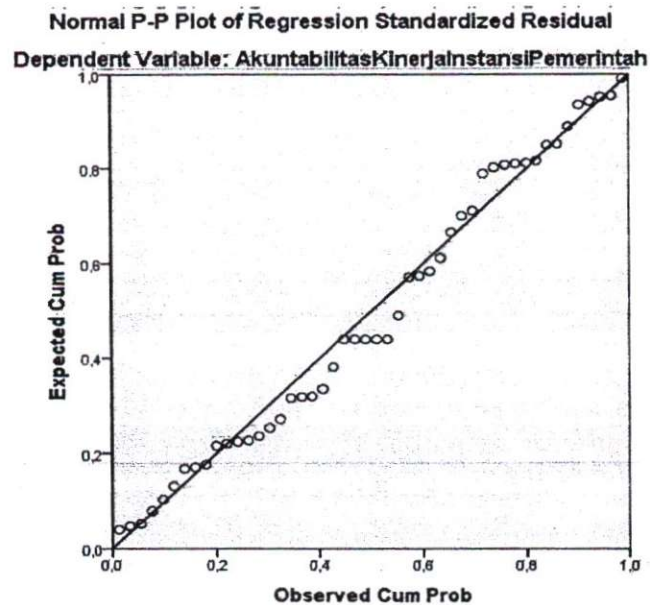
c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji normalitas data untuk item-item variabel anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dengan menggunakan Normal P-P Plot

pada program SPSS versi 24, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar IV.2
Hasil Uji Normalitas Data



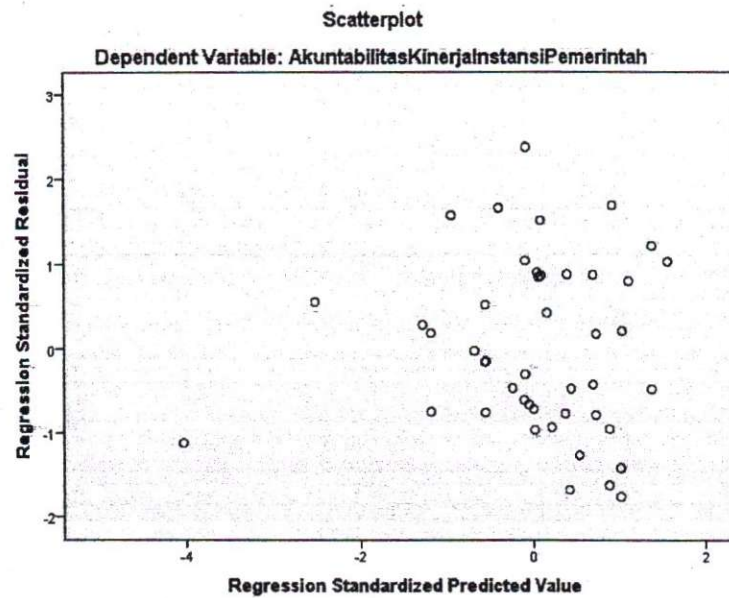
Sumber: Hasil Pengolahan data, 2017

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot, menunjukkan bahwa titik-titik masih berada di sekitar garis lurus. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan untuk varian yang berbeda disebut heterokedastisitas.

Gambar IV.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan gambar IV.3 menunjukkan bahwa data tersebar disekitar titik-titik nol dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

3) Uji Autokorelasi

Uji *Darbin Watson* penelitian ini dibantu dengan SPSS versi 24 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.16
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,718 ^a	,515	,505	4,594708	1,776

a. Predictors: (Constant), AnggaranBerkbasisKinerja

b. Dependent Variable: AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.16 nilai *Durbin Watson* pada penelitian ini yaitu sebesar 1,776 berkisar antara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

d. Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel IV.17
Hasil Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,336	4,018		1,577	,122
AnggaranBerkbasisKinerja	,500	,071	,718	6,996	,000

a. Dependent Variable: AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.17 menunjukkan bahwa hasil regresi pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dapat digambarkan persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 6,336 + 0,500 + e$$

Dari persamaan tersebut, dapat dilihat koefisien regresi dari variabel independen (X) bertanda positif yang searah. Dengan kata lain, semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X), maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) atau semakin buruk pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (X), maka akan semakin buruk pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Berdasarkan persamaan regresi tersebut, setiap terjadi peningkatan anggaran berbasis kinerja sebesar 100% akan diikuti pula oleh peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 50%, sebaliknya jika ada penurunan anggaran berbasis kinerja sebesar 100% maka akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

e. Uji Koefisien Determinasi

Tabel IV.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,718 ^a	,515	,505	4,594708

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Nilai R square (R^2) sebesar 0,515 angka tersebut menggambarkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel anggaran berbasis kinerja (X) sebesar 51,5% sedangkan sisanya 48,5% ($100\% - 51,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Hal ini berarti

menggambarkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan model pada penelitian selanjutnya.

f. Uji-t (Hipotesis)

Tabel IV.19
Hasil Uji t (Hipotesis)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	6,336	4,018		1,577	,122
AnggaranBerbasisKinerja	,500	,071	,718	6,996	,000

a. Dependent Variable: AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel *Coefficients* tersebut, dapat dilihat bahwa t_{tabel} dengan taraf nyata (α) 0,05 $df (n-2) = (48-2) = 46$ sebesar 2,01290. Nilai signifikan t variabel anggaran berbasis kinerja (X) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebesar 6,996 dengan menggunakan t_{tabel} dengan taraf nyata 0,05 hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,996 > 2,01290$) atau signifikan anggaran berbasis kinerja $0,000 < signifikan \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Setelah dilakukan pengujian hipotesis maka diperoleh nilai signifikansi variabel anggaran berbasis kinerja lebih kecil dari α yang telah

ditentukan, ini berarti anggaran berbasis kinerja secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} serta koefisien regresi variabel anggaran berbasis kinerja menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berarti semakin baik pelaksanaan anggaran berbasis kinerja maka akan semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan anggaran Bappeda Provinsi Sumsel dilakukan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Bappeda sebagai pengguna anggaran dan mengutamakan pencapaian hasil kerja dari pelaksanaan alokasi yang ditetapkan. Setiap kegiatan atau program dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tersedianya informasi finansial yang lengkap untuk digunakan sebagai penyusunan anggaran, yang selanjutnya dilakukan rapat kinerja anggaran yang dimulai dari bulan Juli hingga Agustus.

Tahap Ratifikasi, pimpinan telah memiliki integritas yang tinggi untuk menjawab semua bantahan yang akan diajukan pihak eksekutif pada tahap ratifikasi, dan waktu pengesahan telah sesuai dengan rencana implementasi anggaran dengan batas waktu pengesahan yaitu 31 Desember,

serta alasan yang disampaikan dalam pengesahan anggaran telah sesuai dengan perencanaan pembuatan anggaran untuk pelaksanaan program yaitu sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan standar kerja yang telah ditetapkan.

Tahap implementasi anggaran terdapat sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, dimana sistem tersebut dinamakan sistem informasi keuangan daerah yang merupakan suatu program atau aplikasi komputer dengan total anggaran yang sudah tercatat dalam sistem, pelaksanaan anggaran di Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah selaras dengan tujuan serta realistis (dapat dicapai). Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk pengendalian anggaran dan sistem akuntansi tersebut dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran berikutnya.

Tahap pelaporan dan evaluasi sangat memperhatikan akuntabilitas suatu anggaran dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Hasil pelaporan dan evaluasi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen, apabila sistem tersebut terlaksana dengan baik maka laporan yang dihasilkan pula akan baik dan sesuai dengan rencana. Laporan realisasi anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, serta mendorong aparaturnya untuk selalu meningkatkan kinerja.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa pada anggaran berbasis kinerja yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana

dengan baik karena banyaknya responden menjawab sangat setuju dan setuju untuk setiap pernyataan yang diajukan.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategik organisasi. Tolak ukur keberhasilan system ini terletak pada prestasi dari tujuan atau hasil anggaran dengan menggunakan dana secara efisien.

Dalam pengaruhnya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengukuran kinerja memuat anggaran berbasis kinerja untuk mengetahui hasil capaian program dengan visi dan misi instansi pemerintah. Jadi, dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja yang baik, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Komang, dkk (2014) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syambudi (2012) menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Harjanti (2009) yang menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh sangat lemah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran berbasis kinerja secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikarenakan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan nilai signifikan lebih kecil dari α yang telah ditentukan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis kepada pegawai dan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bappeda Provinsi Sumatera Selatan lebih memperhatikan pencapaian target program dan kinerja yang menjadi acuan dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja serta mengoptimalkan pengawasan terhadap jalannya program agar dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah referensi lain untuk memperluas objek penelitian serta menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti dan juga menambah responden lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPPN. Yogyakarta.
- Budi Santoso. 2015. *Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Kelima. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Deddi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintahan Kota Parepare)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Makassar: Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanudin. (online), ([https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzqjA3vHQAhXKs48KHbjgBfIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F3224%2FHASPIARTI%2520\(A31108953\)%2520SKRIPSI%2520FULL.docx%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFQx-VnEjQmLXfOAOal5RvUEoPshw&sig2=G6SGpcodYIOeFaYOY8znT](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCzqjA3vHQAhXKs48KHbjgBfIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Frepository.unhas.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F3224%2FHASPIARTI%2520(A31108953)%2520SKRIPSI%2520FULL.docx%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNFQx-VnEjQmLXfOAOal5RvUEoPshw&sig2=G6SGpcodYIOeFaYOY8znT)), di akses pada tanggal 18 November 2016).
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Iqbal Hasan. 2012. *Pokok-pokok Materi Statistik 2*. Edisi Kedua. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Komang, dkk. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja. (*Jurnal Akuntansi*), (online), Vol 2, No 1, (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjGq8nk6fHQAhWKP08KHUPWCvoQFggjMAI&url=http%3A%2F%2Fejournal.undiksha.ac.id%2Findex.php%2FSA1ak%2Farticle%2Fdownload%2F3390%2F2760&usg=AFQjCNFLiHDfbyGfnwZy3oNN7p9oAEwEsA&sig2=T5kG5xPih_mpdWt4WAb9yg&bvm=bv.141320020,d.c2I), diakses pada tanggal 11 November 2016).
- Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (2003). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

- Program Strata Satu. 2016. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* (2007) Jakarta: Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (2014) Jakarta: Presiden Republik Indonesia..
- Santoso Singgih. 2012. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- Syambudi Prasetya Bahri. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Bandung: Program Studi Akuntansi, Universitas Pasundan Bandung. (online), (https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEWjGq8nk6fHQAhWKP08KHUPWCv_oQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.academia.edu%2F8756582%2FJbptunpaspp-gdl-syambudipr-2616-1-skripsi-l&usg=AFQjCNGhQUieNP_IARpActnyItVwvTYUsA&sig2=UtsJhH8UIgayhA3T-YBgAQ&bvm=bv.141320020,d.c2I), diakses pada tanggal 18 November 2016).
- Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jalan Kapt. A. Rivai No. 23 Telp. (0711) 356018–356118 Faximile 321181–356118 Palembang
website: www.bappeda.sumselprov.go.id, email: info@bappeda.sumselprov.go.id.



Palembang, 08 Februari 2017

Nomor : 800/0321 /Bappeda-V/2017 Yth. Kepada
Sifat : Biasa Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lampiran : - Universitas Muhammadiyah
Hal : Selesai Melakukan Penelitian di-
Palembang

Sehubungan surat pengantar dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Desember 2016 Nomor 070/2371/Ban.KBP/2016 dan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Palembang tanggal 19 November 2016 Nomor 1074/H-FEB-UMP/IX/2016. Hal seperti diatas, dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswi yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Ana Muchlisa Rezeqiah
NIM : 22 2013 159
Program Studi : Akuntansi

Telah selesai melakukan penelitian di BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan
Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis,


M. Adhie Martadhiwira
Pembina
NIP. 197303291998031001

Tembusan Yth. :

Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan (sebagai laporan).



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ANA MUCHLISA REZAQIAH
NIM : 222013159
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (23) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2016 الأربعماء, 19 أكتوبر,
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Ana Muchlisa Rezeqiah
Place/Date of Birth : Palembang, December 23rd 1995
Test Times Taken : +1
Test Date : December, 10th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 49
Structure Grammar : 43
Reading Comprehension : 42
OVERALL SCORE : 446

Palembang, December, 20th 2016
Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

No. 999-1016/TEA FE/LB/UMP/XII/2016

NBM/NIDN. **1164932/0210098402**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIGAMA

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : ANA MUCHLISA REZEQIAH
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013159
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 23-12-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : 8 ILIR (B)
Kecamatan : ILIR TIMUR II
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.

NBM/NIDN. 743462/0230106301

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred / I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred / I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred / S / 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred / L / 2015 (B)

Email : febumpg@urip.palembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)513018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 21 Februari 2017
Pukul : 13:00 s/d 17:00 wib
Nama : Ana Muchlisa Rezeqiah
NIM : 22 2013 159
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan)

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Pembimbing	10 / 3 / 2017	
2	Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	10 / 3 / 2017	
3	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji 1	10 / 3 / 2017	
4	Hj. Ida Zuraidah, S.E., Ak., M.Si	Penguji 2	7 / 3 / 2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan,
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806